

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KELURAHAN ALEHANUAE KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI

Oleh:
Muhlis Hajar Adiputra
Universitas Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pembinaan usaha kecil menengah khususnya kelompok usaha pandai besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kelompok usaha pandai besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, pembinaan kelompok usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia, dengan melakukan pendampingan dan memberikan bantuan fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah khususnya kelompok pandai besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat namun secara aplikatif serta hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan, magang atau studi banding, pendampingan dan pemberian bantuan peralatan produksi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal.

Kata kunci: Pembinaan UMKM; Pandai Besi.

PENDAHULUN

Pemerintah bukan hanya memberikan pelayanan terhadap masyarakat tetapi juga termasuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan terhadap kelompok usaha kecil yang sedang dijalankan masyarakat. Salah satu kelompok usaha kecil yang sedang dijalankan masyarakat di Kabupaten Sinjai dimanifestasikan dalam usaha kerajinan pembuatan perkakas pertanian yang akan mendorong tumbuhnya usaha yang memiliki kemandirian. Pembinaan terhadap kelompok usaha pandai besi ini dimaksudkan agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan kualitasnya sehingga ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang.

Salah satu usaha kecil pada sektor kerajinan di Kabupaten Sinjai adalah kerajinan pembuatan perkakas pertanian (Pandai Besi) di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara yang telah berlangsung lama. Namun kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya karena dikelola secara tradisional. Selain itu permasalahan yang menjadi kendala kelompok pandai besi di Baruttung adalah terbatasnya modal usaha, ketersediaan bahan baku, kendala pemasaran hingga kemampuan manajerial yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan kelompok usaha lain.

Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan pada kelompok usaha pandai besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara. Pembinaan yang

Oleh: Muhlis Hajar Adiputra

dimaksud adalah pembinaan pada tataran mikro yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen, pemasaran dan permodalan. Hal ini bertujuan agar kelompok usaha pandai besi mampu merespon perubahan pasar lokal yang semakin dinamis. Dalam pembinaan kelompok usaha pandai besi tersebut diharapkan agar tidak hanya menguatkan sumber daya manusianya sehingga tidak hanya kemandirian terbangun tetapi juga kemampuan mengelolah usaha sehingga lebih profesional dan produktif yang akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi kelompok pandai besi di Kelurahan Alehanuae.

Kelompok usaha pandai besi di Kelurahan Alehanuae merupakan salah satu kategori dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sinjai terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Melihat potensi besar yang dimiliki UMKM maka kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan menjadi sangat penting. Karena UMKM juga memiliki peran penting dalam hal memberdayakan masyarakat yang pengangguran, dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah masyarakat dituntun mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, termasuk usaha pandai besi yang ada di Kelurahan Alehanuae memiliki potensi yang cukup bagus untuk pengembangan sektor ekonomi daerah. Di Kabupaten Sinjai tercatat 17.715 UMKM tahun 2018. Adapun rinciannya pada tabel berikut;

Tabel 1
Jumlah UMKM 2018 Tiap Kecamatan Di Kabupaten Sinjai

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	JUMLAH
1	Sinjai Utara	1467	1154	327	2948
2	Sinjai Timur	1406	708	252	2361
3	Sinjai Selatan	1475	1082	249	2806
4	Sinjai Barat	1104	861	142	1965
5	Sinjai Tengah	950	500	60	1450
6	Sinjai Borong	993	649	319	1642
7	Bulupoddo	612	616	235	1463
8	Tellu Limpoe	984	687	204	1825
9	Pulau IX	552	139	52	691
TOTAL		9543	6341	1840	17.715

Sumber: Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja 2019

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa perkembangan usaha kecil di Kabupaten Sinjai sangat pesat sehingga menjadi tolak ukur untuk Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan kualitas UMKM yang ada agar mampu mencapai kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Akan tetapi kenyataannya yang ada dilapangan UMKM belum tersentuh dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun kualitas dan Kuantitas yang dimiliki UMKM di Kelurahan Alehanuae

Kecamatan Sinjai Utara meskipun tidak seluruhnya mendapat pembinaan dari pemerintah daerah namun kelompok usaha milik masyarakat ini tetap memproduksi secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah: bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999:107). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan.

Pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan perencanaan secara seimbang dan teliti dalam menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, karena dengan adanya perencanaan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah mampu meningkatkan sumber daya yang ada didalam daerah tersebut, maka secara keseluruhan bisa dilihat sebagai pusat ekonomi yang dapat dikembangkan dimana didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berkesinambungan dengan yang lainnya sehingga peran pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi daerah adalah:

1. Enterpreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yang harus dikelola lebi baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

- a. Koordinator, Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah.
- b. Fasilitator Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat

Oleh: Muhlis Hajar Adiputra

pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) didaerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (zoning) yang lebih baik. Peran fasilitator tidak saja hanya penyediaan atau perbaikan lingkungan, tetapi pemerintah daerah harus membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perijinan bagi investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya juga mencegah kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Karena kalau tidak demikian, maka investor akan seenaknya mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

Untuk mengembangkan ekonomi daerah, pemerintah harus meningkatkan daya saing yang ada di daerah tersebut, mengatasi masalah-masalah pasar yang menghambat proses pembangunan ekonomi di suatu daerah, mempercepat pemulihan ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha di suatu daerah. Kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan daya saing usaha daerah, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, mengatasi masalah-masalah pengangguran, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakmerataan, keterbelakangan sosial, dan kekurangan prasarana di daerah yang bersangkutan untuk memajukan ekonomi suatu daerah maka harus meningkatkan kemampuan atau skill yang dimiliki suatu daerah tersebut untuk itu diperlukan suatu strategi pembangunan ekonomi daerah yang jelas, dengan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki yang dapat berdaya saing baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang dapat menjadi penopang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ada di daerah.

Dalam pembangunan ekonomi peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Peran pemerintah baik dari pusat maupun daerah dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada baik dari ekonomi, kesehatan maupun dari segi pendidikan keran pemerintah memiliki peran sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi. Dengan adanya peran pemerintahlah yang memiliki kewenangan dan yang dapat merencanakan bagaimana bentuk pelaksanaan rancangan pembangunan yang telah dibuat, apakah sudah sesuai dengan instrumen atau ada kekurangan dalam pelaksanaannya Jadi, pemerintah memiliki peran sebagai pengendali.

Untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-langkah fiskal dan moneter yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan sosial yang mengancam Negara berkembang. Mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan psikologis, ideologi, social, dan politik yang

menguntungkan bagi pembangunan ekonomi menjadi tugas penting pemerintah. Pemerintah juga memiliki peran yang strategis dibidang perekonomian dalam negara, baik sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator, sehingga pemerintah mempunyai peranan penting dalam memajukan suatu perekonomiannya sendiri, segala sesuatu perlu dilakukan agar bisa menciptakan ide baru dalam melaksanakan suatu kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga memiliki kontrol yang berkesinambungan. Maka dari itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mulai memperhatikan pembangunan ekonomi di setiap daerah yang mengutamakan masalah sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya karena untuk melakukan perubahan dalam setiap daerah sumber daya merupakan faktor produksi yang paling utama dalam pembangunan baik sumber daya manusia, sumber daya alam.

Menurut Hamid & Ato, dalam Akadun, 2009, Pemerintah memiliki peran strategi dalam pembangunan perekonomian dalam suatu negara yang menggunakan berbagai kebijakan yang terkait di bidang publik, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan investasi, menarik investasi, dan mendorong perkembangan teknologi serta menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan bursa tenaga kerja.

Pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi bisa tercapai apabila pemerintah berperan aktif dalam setiap pembangunan ekonomi daerah yang diselenggarakan sehingga dapat mewujudkan peningkatan pendapatan nasional yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembangunan perekonomian perlu melibatkan semua pihak baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena pemerintah memiliki peran utama yang memiliki aturan-aturan serta mempunyai kemampuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di setiap daerah, sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat meningkatkan pendapatan penduduk secara signifikan, lapangan kerja berkembang daya beli masyarakat mengalami peningkatan dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian tersebut. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi.

Pemerintah juga memiliki peran penting terlibat secara langsung maupun tidak langsung didalam pertumbuhan perekonomian karena untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan alam dan sosial, karena pada sektor swasta tidak bisa mengatasi dampak yang terjadi seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Jadi pemerintah bertanggungjawab dalam kegiatan perekonomian agar mampu menanggulangi kegagalan pasar yang terjadi sehingga tidak adanya eksternalisasi yang merugikan banyak pihak.

Pembinaan UMKM

Pembinaan adalah pemberian fasilitas, bimbingan dan pendampingan dalam proses pengembangan, pengembangan yang dimaksud adalah suatu usaha yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Pembinaan UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1998 yang mana pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan dengan terarah dan terpadu untuk mewujudkan UMKM yang mandiri sehingga usaha tersebut dapat berkembang. Maka dapat disimpulkan, pemberdayaan merupakan suatu cara untuk memberikan motivasi maupun dorongan baik secara individu maupun kelompok agar mampu mandiri dan dapat mengembangkan usahanya secara profesional baik dalam pembinaan pemerintah ataupun sudah tidak dalam pembinaan pemerintah.

Proses pembinaan memusatkan pada pembelajaran berkesinambungan, pertumbuhan dan perubahan, yang membawa hasil dalam pembangunan keterpenuhan kebutuhan sumber daya internal seseorang. Pembinaan mengarahkan secara langsung atau tidak langsung energi dan keinginan karyawan untuk meningkatkan motivasi, mencapai tujuan, dan memaksimalkan potensi. Dengan kata lain, pembinaan merupakan memberdayakan orang dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan diri, dan perbaikan kinerja (Kaswan, 2013:207).

Adapun prinsip dan tujuan pembinaan UMKM yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu;

1. Prinsip pemberdayaan UMKM

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya saing UMKM
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan Pemberdayaan UMKM

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dari ketidakmampuannya dengan melakukan pemberdayaan bisa mewujudkan masyarakat yang adil, demokrasi, sejahtera dan maju. Pemberdayaan terhadap masyarakat bisa terwujud apabila peran

pemerintah kepada masyarakat dilaksanakan dengan benar, karena pemerintah memiliki fungsi mengayomi, membimbing dan memberdayakan dalam fungsi memberdayakan pemerintah dapat memberdayakan masyarakat dengan memperbaiki sistem ekonomi.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya memberikan motivasi kepada masyarakat yang mengembangkan suatu usaha atau UMKM agar masyarakat memiliki kesadaran serta meningkatkan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam usahanya sendiri dengan melakukan pengembangan potensi diri yang dimiliki, mengembangkan daya saing yang baik antar usaha meningkatkan produktifitasnya meningkatkan kualitas dan kuantitasnya yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri, memiliki potensi dan daya saing yang tinggi dengan usaha lainnya dan menjadi masyarakat yang sejahtera.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pembinaan UMKM terutama Pandai Besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupten Sinjai.

Teknik analisis data yang akan penulis laksanakan pada penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu: 1) Reduksi data (*data reduction*); 2) Penyajian data (*data display*); 3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL PENELITIAN

Kabupaten Sinjai memiliki daya tarik tersendiri, salah satunya adalah sebuah perkampungan yang dijuluki kampung besi kampung ini terletak Baruttung, Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Kampung ini dijuluki kampung besi sebab merupakan sentra logam pandai besi dan sebagian besar warga di Kelurahan Alehanuae berprofesi sebagai pandai besi yang handal. Awal mula munculnya pengrajin pandai besi di Baruttung menurut Zaenal Abidin salah satu pengrajin pandai besi di Baruttung, dahulu kala sebelum Indonesia merdeka ada orang yang bernama Panre Caco yang berprofesi sebagai pandai besi handal bahkan dari luar kabupaten sendiri mengakui kehebatannya. Maka dari situ banyak pandai besi di kampung ini mewarisi secara turun temurun keahlian panre caco sehingga banyak pemasok dari luar Kabupaten.

Di Kelurahan Alehanuae terdapat 22 industri rumah tangga dengan tenaga kerja yang berjumlah 1 sampai 4 orang. Dengan demikian kelompok usaha pandai besi yang ada di Kelurahan Alehanuae

Oleh: Muhlis Hajar Adiputra

merupakan kelompok usaha/industri rumahan karena tenaga kerjanya hanya 1-4 orang. Namun demikian industri rumahan pandai besi ini dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Adapun barang produksi pandai besi berupa peralatan pertanian seperti: Cangkul, Pisau, Parang, Sabit, Garpu dan lainnya.

Dari hasil penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara jelas dan menganalisis pembinaan apa saja yang telah dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terhadap industri kecil dan menengah pandai besi melalui Dinas terkait. Adapun dinas terkait dalam pembinaan pandai besi ini adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Energi Sumber Daya Mineral bertanggungjawab terhadap produksinya sedangkan Dinas Koperasi bertanggungjawab terhadap manajemen usahanya. Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara implementatif sudah terlaksana dengan baik.

Adapun pembinaan yang dilakukan meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendampingan, Memberikan Bantuan Fasilitas Produksi dan Pembinaan kelompok usaha kecil menengah pandai besi di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia pandai besi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia bagi pelaku usaha pandai besi salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai telah memfasilitasi kelompok pandai besi yang ada di Kabupaten Sinjai untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Studi banding tersebut diikuti lima orang peserta perajin pandai besi dari Lingkungan Baruttung Kelurahan Alehanuae, pandai besi Kecamatan Bulupoddo dan pandai besi Kecamatan Sinjai Barat adapun data yang mengikuti On Job Training adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Peserta On Job Training (OJT) Magang

No	Nama	Asal Kelompok	Ket
1	Zainal Abidin	Sinar Karya	Kelurahan Alehanuae
2	Muh Darwis	Evi jaya	Kecamatan Bulupoddo
3	Bahtiar	Karya Tani	Kecamatan Sinjai Barat
4	Syamsul Kamar	Sinar Karya	Kelurahan Alehanuae
5	Supriadi	Maddakko	Kecamatan Sinjai Barat

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian & ESDM Kab. Sinjai

Studi banding bertujuan bagi peningkatan efisiensi pada proses produksi dan manajemen usaha. Sehingga hasil produksi pengrajin pandai besi di Kabupaten Sinjai khususnya di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara dapat memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan

pandai besi di daerah lain. Selanjutnya terkait dengan pemahaman yang harus dimiliki pandai besi ini akan berdampak positif pada peningkatan jejaring pemasaran produksinya. Studi banding ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi karena selama ini kapasitas produksi dari kelompok pandai besi di Kelurahan Alehanuae masih sangat kecil yaitu sekitar 10-15 unit. Hal ini disebabkan karena peralatan yang digunakan masih manual.

Berdasarkan analisa penulis mengenai fakta yang terjadi pada obyek penelitian, maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan sumber daya manusia pandai besi di Kelurahan Alehanuae dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. *On job training* (Study Banding) ke pandai besi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah selama 4 hari untuk mempelajari teknik teknik penempaan besi dan manajemen pengelolaan kelompok usaha pandai besi
- b. Memberikan pelatihan kepada pandai besi sebagai bentuk peningkatan kualitas produksinya.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai memberikan manfaat yang bagus bagi pandai besi karena dapat meningkatkan kemampuan teknis serta pemahaman mulai dari pemilihan bahan baku sampai proses bahan jadi yang siap dipasarkan, namun tidak semua pandai besi yang mengikuti pelatihan langsung mengaplikasikan pelatihan yang telah diikuti ditempat produksinya hanya sebagai bahan penambahan ilmu sehingga produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah dari segi kualitas produk. Adapun jenis pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM adalah pelatihan Diversifikasi dan Finishing Produk Pandai Besi dan Pelatihan Elektroplating dengan di ikuti masing-masing sepuluh (10 Peserta) adapun daftar nama peserta yang ikut dalam pelatihan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.

Daftar peserta pelatihan Diversifikasi dan Finishing Produk Pandai Besi
Di Kabupaten Sinjai

No	Nama peserta Diversifikasi dan Finishing Produk Pandai Besi	Alamat	Jenis Usaha
1.	Syamsuddin	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
2.	Ahmad	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
3.	Sudirman	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
4.	Ruslan	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
5.	Hasanudding	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
6.	Bakri	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
7.	Sirajuddin	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
8.	P. Boge	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
9.	Rasyid	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
10.	Nureka	Kel. Alehanuae	Pandai Besi

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

Oleh: Muhlis Hajar Adiputra

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa peserta pelatihan diversifikasi dan finishing produk pandai besi yang dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai dengan 01 Oktober tahun 2015 yang diikuti sepuluh (10) peserta semua berasal dari Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dengan adanya pelatihan ini diharapkan semua peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan hasil produksinya dengan berbagai macam jenis produk yang dihasilkan seperti cangkul, sabit, pisau, parang, linggis dan siu traktor.

Tabel 4.

Daftar Peserta Pelatihan Elektroplating Di Kabupaten Sinjai

No	Nama Peserta Pelatihan Elektroplating	Alamat	Jenis Usaha
1	Muh. Taufik	Sinjai Barat	Pembuat Mesin
2	Bado	Sinjai Barat	Pandai Besi
3	Khaeran Alam	Sinjai Utara	Bengkel
4	Ari	Sinjai Utara	Bengkel
5	Umar	Sinjai Timur	Benkel
6	Darwis	Bulupoddo	Pandai Besi
7	Zainal Abidin	Sinjai Utara Kel. Alehanuae	Pandai Besi
8	Muh. Ridwan	Sinjai Utara Kel. Alehanuae	Pandai Besi
9	H. Kulahu	Bulupoddo	Pandai Besi
10	Abd. Kadir	Bulupoddo	Pandai Besi

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai (2019)

Pelatihan Elektroplating yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian & ESDM Kabupaten Sinjai diikuti sepuluh peserta (10) dari empat Kecamatan di Kabupaten Sinjai yang jenis usahanya yaitu ada dari Pandai besi, pembuat mesin dan perbengkelan. Dari pelatihan ini semua peserta yang mengikuti diharapkan dapat menerapkan pada proses produksinya sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai lebih dipasarkan dari segi tampilan yang lebih menarik minat konsumen.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan jenis produksi dan memiliki produk yang jauh lebih bagus lagi namun hasil dari pelatihan ini tidak semua bisa diaplikasikan oleh pengrajin pandai besi karena masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki karen pelatihan hanya dilaksanakan lima hari dan bahan baku yang digunakan juga menja di kendala bagi pengrajin seperti yang diungkapkan pada salah satu pengrajin pandai besi.

Pelatihan yang pernah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Sumber Daya Mineral yang bekerjasama Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan. Namun hasil pelatihan yang didapatkan oleh pandai besi tidak serta merta dipraktekkan karena berbeda dengan kebiasaan para pandai besi dalam mengola dan memproduksi barang. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang meningkatkan sumber daya manusia yaitu peran

pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada pengrajin pandai besi menunjukkan hasil yang baik karena pemerintah selalu berupaya bagaimana pengrajin bisa meningkatkan kualitas produknya dengan memberikan pelatihan dengan pelatihan ini pandai besi diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksinya serta mampu menambah hasil produksi sehingga pemasaran juga meningkat dan studi banding meski dalam melakukan studi banding peserta yang ikut hanya terbatas dan waktu dalam melakukan studi banding hanya berlangsung lima hari.

2. Pendampingan

Pendampingan merupakan pembinaan lanjutan yang bertujuan pada peningkatan kapasitas kelompok usaha pandai besi. Pendampingan ini jika dilihat dari sisi produksi adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan terhadap pengembangan usaha. Pendampingan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang bagus untuk mengawasi siklus perkembangan pada kelompok pandai besi yang ada baik dari segi produksi dan pemasarannya.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai, sejak hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 mulai melakukan pendampingan kepada kelompok pandai besi. Proses pendampingan dikhususkan pada perbaikan proses produksi yang menggunakan mesin tempa. Mesin yang ada merupakan swadaya kelompok tersebut. Dengan adanya mesin tempa diharapkan jumlah produksi meningkat dan mutu produk lebih baik.

Pendampingan terhadap kelompok pandai besi di Kelurahan Alehanuae dilakukan sejak tahun 2006. Hasil dari pendampingan tersebut adalah perbaikan hasil produksi. Sebagai tindak lanjut dari hasil pendampingan adalah dilakukan kegiatan pelatihan, Bimtek dan On job training. Model pendampingan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai yaitu model pendampingan yang langsung turun ketempat produksi pandai besi yang dilakukan oleh tenaga pendamping lapangan yang memantau hasil produksi, jenis produksi yang dibuat serta bahan baku yang diperoleh dari mana sampai pemasaran yang dilakukan oleh pengrajin pandai besi, dimana tenaga pendamping dilakukan oleh 2 (dua) orang dimana setiap bulannya turun kelapangan 3 kali pendampingan masing-masing satu tempat produksi, dengan pola pendampingan ini pengrajin akan selalu diperhatikan dan selalu diberikan motivasi untuk tetap melakukan produksi dan hasil dari tenaga pendamping ini akan dibuatkan semacam laporan hasil pendampingan yang akan menjadi tindak lanjut bagi pegawai untuk membuat program perencanaan untuk tahun berikutnya seperti memberikan pendidikan dan pelatihan.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pendampingan dilapangan adalah terbatasnya jumlah tenaga pendamping yaitu tenaga pendamping hanya berjumlah 2 (dua) orang, sementara jumlah pandai besi masing-masing memiliki dapur produksi meskipun tergabung dalam 1

Oleh: Muhlis Hajar Adiputra

kelompok. Tahun ini tenaga pendamping dibagi wilayah kerjanya adapun rincian wilayah kerja tenaga pendamping sebagai berikut:

Tabel 5.
Daftar Nama Tenaga Pendamping

Nama Tenaga Pendamping Lapangan	Wilayah Kerja
Rijal	Kecamatan Tellulimpo, Sinjai Barat dan Sinjai Selatan
Farida, S.Sos	Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Tengah Dan Bulupoddo

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

Tenaga pendamping yang ditugaskan dilapangan diharapkan mampu menjadi penyambung lidah dari berbagai macam keluhan yang ditemukan dilapangan khususnya di tempat produksi pandai besi. Dimana tenaga pendamping melakukan observasi awal di masing-masing tempat produksi mencari tahu kebutuhan apa yang diperlukan pengrajin agar dapat mengetahui keadaan nyata dilapangan dan melakukan tugas pendampingan seperti membimbing, mengoreksi, menasehati, memediasi, pelaku usaha agar tumbuh menjadi pelaku usaha yang produktif dan mampu berdaya saing baik lokal maupun luar daerah.

Adapun pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan di tempat produksi kelompok Sinar Karya di Dusun Baruttung Kelurahan Alehanuae Kabupaten Sinjai adalah pelatihan teknis pembuatan cangkul yang diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta pengrajin pandai besi. Adapun daftar peserta pelatihan teknis pembuatan cangkul adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Daftar Peserta Pelatihan Teknis Pembuatan Cangkul

No	Nama	Alamat	Jenis usaha
1	Zainal Abidin	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
2	Muh Darwis	Bulupoddo	Pandai Besi
3	Ahmad	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
4	Syamsuddin	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
5	Ridwan	Kel. Alehanuae	Pandai Besi
6	Hasanuddin	Bulupoddo	Pandai Besi
7	Bahar	Bulupoddo	Pandai Besi
8	H. Kulahu	Bulupoddo	Pandai Besi
9	Kadir	Bulupoddo	Pandai Besi
10	Idris	Bulupoddo	Pandai Besi

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian & ESDM Kab. Sinjai (2019)

Melalui pelatihan ini peserta saling bertukar pikiran untuk meningkatkan produksinya khususnya pembuatan cangkul dimana jika musim panen tiba jumlah permintaan juga mengalami

peningkatan dan diharapkan dengan adanya pelatihan ini hasil produknya semakin lebih baik dan menambah wawasan bagi pengrajin pandai besi sehingga mampu mengembangkan produknya dan mutu produknya semakin bagus sehingga mampu memberikan kepuasan bagi pelanggannya dan produknya bukan hanya bisa dikenal didaerah setempat namun diharapkan mampu menembus pasar global kedepannya.

Pola pendampingan yang dilakukan terhadap pandai besi di Kelurahan Alehanuae dalam memberikan motivasi terhadap usaha yang sedang dijalankan saat ini. Cara memotivasi mereka adalah pendamping melakukan kunjungan rutin ke tempat tempat produksi atau tempat penempaan besi di Kelurahan Alehanuae. Sedangkan pendidikan dan pelatihan diberikan berdasarkan usulan dari para kelompok panda besi. Teknis dalam pelatihan diberikan oleh instruktur khusus yang memiliki kompetensi di bidangnya sehingga peserta pelatihan mendapatkan ilmu teknis dalam menjalankan usaha menempa logam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program pendampingan kepada kelompok pandai besi di Kelurahan Alehanuae yaitu kegiatan pelatihan. Melakukan promosi hasil produksi pandai besi melalui pameran juga menjadi salah satu bagian dalam program pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah. Hambatan dalam melakukan pendampingan berdasarkan sudut pandang penulis adalah karena terbatasnya tenaga pendamping yang turun langsung kelapangan dalam mengawasi, memberi bimbingan serta yang dapat melihat progres produksi yang dimiliki setiap pengrajin pandai besi baik dari segi produksinya, bahan bakunya sampai bagian pemasarannya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendampingi semua pengrajin pandai besi yang ada di Dusun Baruttung Kelurahan Alehanuae Kabupaten Sinjai.

3. Memberikan Fasilitas

Memberikan fasilitasi untuk kebutuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah hal yang sangat penting oleh karena itu perlu fasilitasi bantuan sarana produksi. Dari penelitian yang dilakukan penulis dilapangan menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral telah memfasilitasi pengrajin pandai besi dengan memberikan bantuan sarana produksi agar dapat membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya, sehingga produk yang dihasilkan dapat berdaya saing tinggi dari produk-produk buatan pabrik lainnya yang sudah lebih unggul dipasar. Sejauh ini bantuan sarana produksi baru satu (1) kelompok di Kelurahan Alehanuae yang mendapatkan bantuan dari Dinas Perdagangan Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu kelompok Sinar Karya.

Pemberian bantuan pada pandai besi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral telah dilakukan namun belum semua kelompok pandai besi mendapatkan bantuan tersebut. Hasil obsevasi menunjukkan bahwa kelompok pandai besi Sinar Karya yang telah mendapatkan bantuan Disperindag. Namun masih terdapat permasalahan terkait pemberian

Oleh: Muhlis Hajar Adiputra

peralatan produksi kepada pandai besi, yaitu : peralatan yang diberikan kepada IKM tidak dapat difungsikan secara maksimal karena daya listrik mesin tersebut terlalu tinggi sementara kapasitas listrik yang dimiliki kelompok pandai besi Sinar Karya masih kategori rendah, yakni 450-900 watt. Pemberian bantuan pada pandai besi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilakukan namun belum semua kelompok pandai besi mendapatkan bantuan tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa kelompok pandai besi Sinar Karya yang telah mendapatkan bantuan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai yaitu berupa alat seperti mesin gurindra, blower, gergaji, diberikan pada saat ada pelatihan yang berlangsung. Dari hasil penelitian penulis yang terjadi di lapangan, peralatan yang diberikan kepada pengrajin pandai besi tidak dapat difungsikan secara maksimal karena daya listrik mesin tersebut terlalu tinggi sementara kapasitas listrik yang dimiliki kelompok pandai besi Sinar Karya masih kategori rendah, yakni 450-900 watt.

Bantuan peralatan berupa mesin tempa yang pernah diberikan Disperindag berasal dari kementerian sehingga tidak dapat disesuaikan dengan sarana dan prasarana pendukung yang terdapat ditempat penerima bantuan tersebut. Pada tahun 2015 bantuan tidak dapat diberikan kepada kelompok yang tidak memiliki badan hukum sehingga kelompok pandai besi di Kelurahan Alehanuae tidak ada lagi yang mendapat bantuan berupa fasilitas produksi. Adapun yang dimaksud kelompok pandai besi yang berbadan hukum adalah koperasi atau sejenisnya.

Dinas Perdagangan, Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral membantu akses pemasaran produk pandai besi di Kelurahan Alehanuae melalui promosi dan pameran. Kegiatan promosi dan pameran yang dilaksanakan pemerintah daerah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai juga menampilkan hasil karya pandai besi dari Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Adapun jenis pameran yang pernah diikuti pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mempromosikan hasil produksi umkm yang ada dikabupaten baik dari hasil industri makanan minuman, industri kerajinan dan industri logam seperti cangkul, parang pisau dan lain- lain adalah Pameran pembangunan Kabupaten Sinjai pameran Sul-Sel Expo, Pameran Pembangunan Makassar dan Pameran Dekranasda.

Promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai cukup baik. Dengan adanya promosi pada pameran hasil karya kelompok pandai besi akan membuka akses pasar ke daerah lain. Namun sejauh ini pandai besi belum merasakan manfaat dari promosi yang telah dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi yang terjadi pada pandai besi di Kelurahan Alehanuae terkait dengan hasil produksinya adalah segmentasi pasarnya masih didominasi oleh konsumen lokal sehingga efek dari promosi yang dilakukan melalui pameran di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan belum dirasakan

oleh para kelompok pandai besi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pengrajin pandai besi mengapresiasi adanya kegiatan pameran yang dilakukan oleh pemerintah baik pameran dalam daerah maupun diluar daerah karena produk pandai besi di Kelurahan Alehanuae bisa menjadi bahan promosi. Pada pameran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk pandai besi yang diproduksinya karena merupakan salah satu ajang bisa menaikkan nilai produk yang dimilikinya sehingga bisa dikenal dari berbagai daerah.

Masalah yang terjadi pasca promosi pada pameran tidak terjadi peningkatan penjualan karena pelaku industri sendiri yang menambah dan memperbaiki hasil produksinya, produksi hanya meningkat pada saat musim panen dan pasca panen tiba seperti permintaan pembuatan sabit, cangkul, dan parang sehingga produk yang dipamerkan hanya sedikit dan hasil produknya kadang tidak rapi sedangkan tujuan utama dari pameran adalah untuk mempromosikan produk yang dihasilkan baik dari segi penampilan, harga kualitas dan berbagai jenis bentuk produk yang ditampilkan. Sedangkan pemberian bantuan berupa modal usaha berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa bantuan dana modal usaha bagi pandai besi di Kelurahan Alehanuae belum pernah diberikan.

Pemberian bantuan berupa fasilitas seperti mesin tempa masih belum bisa mengatasi permasalahan yang ada di kelompok pandai besi karena kurangnya daya listrik bantuan mesin tempa tersebut tidak dapat digunakan sehingga para pengrajin pandai besi masih menggunakan cara tradisional seperti yang telah dilakukan sejak dari dulu. Sebaiknya pemerintah terkait bukan hanya memikirkan soal bantuan peralatan yang akan digunakan untuk para pengrajin sebaiknya juga memikirkan bagaimana daya listrik yang menjadi masalah bisa memikirkan solusi terbaik untuk penambahan daya listrik yang ada di Dusun Baruttung Kelurahan Alehanuae sehingga para pengrajin bisa menggunakan mesin yang memiliki kapasitas daya listrik yang tinggi sehingga dapat mempercepat proses produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan pada kelompok pandai besi di Kelurahan Alehanuae oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat, namun hasil yang dicapai setelah pelaksanaan pembinaan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pameran, magang/studi banding, pendampingan dan bantuan peralatan produksi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal karena produksi tidak secara signifikan dilakukan produksi hanya bertambah jika musim panen tiba sedangkan jika ada permintaan seperti untuk keperluan pameran produk yang dipamerkan tidak dijaga kualitasnya

Oleh: Muhlis Hajar Adiputra

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Budiyanto, M., A.Wijaya. 2004. *Pengenalan Dasar-Dasar PLC (Programmable Logic Controller)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- . 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Congge, Umar. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sinjai: STISIP Muhammadiyah Sinjai.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irawan dan Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Ed 6. Jakarta: BPFE UGM.
- Kaswan. 2013. *Pelatihan dan Pengembangan Untuk Meningkatkan Kinerja SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Kusmuljono, B.S. 2009. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*, Bogor: IPB Press.
- Marhadi. R. 2003. *Ekonomi kerakyatan keunggulan kelemahan dan prospek kedepan Ekonomi kerakyatan dalam kancah globalisasi*. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
- Mubyarto. 2010. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sumaryadi, I. Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia,.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Syamsir Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Priyono, Onny dan Pranaka, A.M.W. 2006. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit: Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Jakarta.
- Wuradji dalam Aziz Muslim. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Referensi Undang-Undang

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) .
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.